ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PADA DESA TRANTANG SAKTI KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2016-2018

Skripsi

Nama : Aria Nugraha

NIM : 22 2015 302

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PADA DESA TRANTANG SAKTI KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2016-2018

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Aria Nugraha

NIM : 22 2015 302

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas Pengelolan Anggaran Belanja Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Tahun 2016-2018

Nama : Aria nugraha
NIM : 222015302
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I

Rosalina Ghozali S.E, Ak, M.si
NIDN/NBM : 0228115802/10211960

Pembimbing II

Mizan, S.E, M.Si, AK,CA
NIDN/NBM: 0206047101/859196

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin. S.E, M.Si, AK,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aria Nugraha

NIM : 22 2015 302

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis

Aria Nugraha

Abstract

Aria Nugraha / 222015302/2019 / The Effectiveness Analysis of Village Budgeting and Expenditure Management (APBDes) in Trantang Sakti Village, Buay Subdistrict, Pemuka Peliung, East Oku Regency 2016-2018 / Public Sector Accounting /.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the APBDes implementation in the magical village. The research was used by the author in this study was descriptive research, the method for collecting the data was documentation. The results of this study indicated that the effectiveness of the revenue budget in Trantang Sakti villages from 2016-2018 was classified as ineffective with an average of 52%, 49.3%, 55.3%. The results of the calculation could also be seen that the average effectiveness of the budget, the village of the challenged in the field of village administration respectively were: 2016 (100%) classified as effective, in 2017 (86.4%) classified as quite effective, in 2018 (97.6%) classified as effective, then in the field of implementation of each village development were: in 2016 (90.1%) classified as effective, in 2017 (48.8%) classified as ineffective, in 2018 (99.4%) classified as effective, then in the field of community development each is: in 2016 (100%) classified as effective, in 2017 (100%) classified as effective, in 2018 (100%) classified as effective, and in the field of empowering each community was : in 2016 (100%) classified as effective, in 2017 (100%) classified as effective, in 2018 (99.7%) classified as effective.

Keywords: Effectiveness and Regional Budget

PENGESAHAN
NO. 595/Abstract/LB/UMP/VIII/2019
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur Tahun 2016-2018. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Penulis sampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Allah Swt, Ibuku tercinta (Siti Muhawanah) beserta Adik ku, serta keluarga ku yang berdo'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Rosalina Ghozali, S.E.Ak.,M.Si dan Bapak Mizan, S.E., M.Si,AK,CA selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakuitas Ekonomi dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si.,selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakuitas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pihak Pemerintah Desa Trantang Sakti.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Penulis

Aria Nugraha

DAFTAR ISI

halaman

HALAMANDEPAN/COVER…….. i

HALAMAN JUDUL……...ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI…….....iii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT…….....iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……...v

HALAMAN PRAKATA……....vi

HALAMAN DAFTAR ISI…….....ix

HALAMAN DAFTAR TABEL……....xi

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN……...xii

ABSTRAK .....

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 9

A. Landasan Teori 11
1. Pemerintah Desa.....11
2. Pengelolaan Keuangan Desa 12
3. Azas Pengelolaan Keuangan Desa 17
4. Anggaran 22
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 24
6. Efektivitas 27
B. Penelitian Sebelumnya……..29

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Jenis Penelitian 33
B. Lokasi Penelitian.....34
C. Operasionalisasi Variabel 34
D. Data yang Diperlukan 34
E. Metode Pengumpulan Data.....35
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....38

A. Hasil Penelitian.....38
1. Sejarah Desa.....38
2. Visi dan Misi.....39
3. Tujuan 40
4. Sasaran 41
5. Strategi 41
6. Struktur Organisasi.....42
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....45
1. Efektivitas 47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 79

A. Kesimpulan 79
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan otonomi daerah memerlukan dukungan dan pengembangan suatu sistem pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Pada tataran pemerintahan, perlu di tumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis *(good governance)*. Sedangkan pada tataran masyarakat harus di kembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi bagi warga dalam proses pengambilan kebijakan.

Mardiasmo (2010:24) menjelaskan bahwa otonomi daerah di tetapkan oleh MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang " Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 1999 Tentang Perimbangan Keuagan Antara Pemrintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Misi utama kedua undang- undang tersebut adalah desentralisasi.

Konsep desentralisasi dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu otonomi provinsi

sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh.

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2015:121) Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka di terbitkan lah peraturan- peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerinta h berjalan dengan optimal.

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh, serta memiliki norma sosial masin masing. Desa sebagai kawasan otonom di berikan hak-hak istimewa , seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan,2016). Menurut Virgie, dkk (2013:97) pengelolaan keuangan desa di turunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang di amanatkan dalam undang undang-undang tersebut, yakni di selenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

V. Wiratna Sujarweni(2015:121-122) menjelaskan bahwa Undang-undang yang baru saja di keluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No 6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut di jelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang di beri kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saaat di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya di perlukan adanya laporan pertanggung jawaban dari desa.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa(ADD), yang di tandai dengan terbitnya peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat stempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintahan desa berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia.

Sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menj adi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007,karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

sedangkan partisipatif, yaitu ke ikut sertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa.

Desa Trantang sakti merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur sejak tahun 1962, mekanisme penyelenggaraan pemerintahannya di laksanakan berdasarkan hukum. Berikut adalah data Jumlah Penduduk, Keadaan sosial dan SDM, serta Mata Pencaharian Penduduk Desa Trantang Sakti.

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	985 Jiwa	49.68 %
2	Perempuan	572 Jiwa	50.32 %
Jumlah		1.857 Jiwa	100 %

Tabel I.2
Jumlah pendududuk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Tamat SD	40
2	Tamat SMP	22
3	Tamat SMA	12
4	Tamat Perguruan Tinggi	0.14
5	Palajar SD	10
6	Pelajar SMP	7
7	Pelajar SMA	5
8	Mahasiswa	0.25
9	Tidak sekolah dan Putus sekolah	0.11
10	Belum Sekolah	3.89

Tabel I.3
Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase dari jumlah penduduk
1	Petani	650	58,72 %
2	Buruh Tani	150	13,55 %
3	Pedagang	15	1,35 %
4	Peternak	20	1,80 %
5	Serabutan	25	2,26 %
6	Perabot		
7	PNS/TNI/POLRI	5	0,45 %
8	Tenaga Honor	8	0,73 %
9	Ibu rumah Tangga	105	9,49 %
10	Sopir	4	0,36 %
11	Buruh Bangunan	25	2,26 %
12	Nelayan		
13	Pertambangan		
14	Bengkel	5	0,45 %
15	Belum Bekerja	50	4,52 %
16	Tidak Bekerja	45	4,06 %
Jumlah		1.107	100 %

Berkaitan dengan bantuan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, jumlah anggaran pendapatan yang di targetkan dan terealisasi pada desa trantang sakti pertahun 2016-2018, yaitu 2016 target sebesar Rp.738.081.028, terealisasi sebesar Rp.718.637.649,64, 2017 target sebesar Rp. 972.158.693,82, terealisasi sebesar Rp. 912.748.731,33, 2018 target sebesar Rp. 889.693.345,95, terealisasi sebesar Rp. 938.882.004,95.

Kemudian jumlah anggaran belanja yang di targetkan dan terealisasi pertahun 2016-2018, yaitu 2016 target sebesar Rp. 736.271.250, terealisasi sebesar Rp. 710.379.800, 2017 target sebesar Rp. 922.127.525, terealisasi sebesar Rp. 861.813.300, 2018 target sebesar Rp. 844.976.390, terealisasi sebesar Rp. 837.299.650.

Dari penjelasan diatas ditemukan permasalahan yang muncul bahwa kesamaan antara target dengan realisasi program APBDes tiap tahunnya cendrung fluktuasi, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subyek dan obyek program APBDes masih kurang matang . Terlepas dari masyarakat desa, hambatan dalam merealisasi APBDes bisa saja datang dari pihak luar. Hambatan dari pihak luar ini terjadi pada tahun 2018, yaitu di tahun 2018 pada realisasi pendapatan, pemerintah memberikan dana tambahan di alokasi dana desa sebesar Rp. 51.566.519 sehingga terjadi penambahan dana pada terget atau rencana yang sudah di tergetkan sebelumnya, namun pada saat berjalannya realisasi program-program yang ada, pemerintah justru sangat terlambat dalam mencairkan tambahan dana yang seharusnya bisa di cairkan tepat waktu, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan program-program yang seharusnya bisa di maksimalkan oleh desa. Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindak lanjuti untuk meningkatkan pengelolaan APBdes secara lebih maksimal. Berikut adalah data realisasi APBDes Desa Trantang Sakti.

Tabel 1.4
Realisasi Pendapatan Desa Trantang Sakti Tahun 2016-2018

Tahun	Target Realisasi	Realisasi	Persentase (%)
2016	738.081.028	718.637.649,64	97,37%
2017	972.158.693,82	912.748.731,33	93,88%
2018	889.693.345,95	938.882.004,95	105,5%

Tabel I.5
Tabel Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer
2016	1.800.000	736.281.028
2017	2.500.000	972.158.693,82
2018	2.500.000	887.193.345,95

Tabel.I.6
Realisasi Anggaran Belanja Desa Trantang sakti tahun 2016-2018

Tahun	Target Realisasi	Relisasi	Persentase (%)
2016	736.271.250	710.379.800	96,48%
2017	922.127.525	861.813.300	93,45%
2018	844.976.390	837.299.650	99%

Alasan peneliti memilih APBDes sebagai bahan penelitian dikarenakan APBDes mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa. Apabila APBDes benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul **"Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur Tahun 2016-2018".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan kegiatan APBDes di Desa Trantang Sakti , Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur sudah berjalan secara efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan APBDes di Desa Trantang Sakti, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Memberikan wawasan serta menambah pengetahuan mengenai tingkat efektifitas APBDes di Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur.

2. Bagi Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur

   Sebagai masukan tentang kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada realisasi APBDes, yang di gunakan untuk melakukan penyempurnaan kembali dan sebagai bahan evaluasi pada anggaran yang di keluarkan.

3. Bagi Almamater

   Bagi almamater di harapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: ANDI

Mahmudi.2016. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: UII Press

Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakart: ANDI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Konsep Desentralisasi.

V. Wiratna Sujarweni.2015. *Akuntansi Desa*.Yogyakarta: Pustaka Baru Press

V.Wiratna Sujarweni.2015. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa.

Yunianti, Umi. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).Seminar Nasional.Universitas PGRI Yogyakarta.*

A Siregar, Fachrul, Fazli Syam BZ.2017. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa(Studi Pada Desa di Kabupaten Deli Serdang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi(JIMEKA) Vol.2, No.4, Universitas Syiah Kuala.

Saputra, I Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi(JJPE) Vol.6, No.1, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 Tentang Pertanggung Jawaban.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 204 Pasal 71 Tentang Pendapatan Desa.

Novita, Dian. 2016. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. UIN Syarif Hidayahtullah Jakarta.

Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.